

## BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Dinas Kesehatan Tahun 2018” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Komponen Input

- a. Jumlah tenaga yang ada di Dinas Kesehatan Kota Padang untuk penyusunan perencanaan penganggaran sudah sangat cukup, namun secara kualitas kemampuan tenaga tersebut dalam penyiapan perencanaan masih terbatas.
- b. Tidak terdapat dana khusus untuk penyusunan perencanaan, dana yang digunakan bersumber dari dana rutin.
- c. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan penganggaran sudah sangat mencukupi.
- d. Kebijakan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan penganggaran di Dinas Kesehatan Kota Padang adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengenai tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, peraturan dari kementerian kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan hingga surat

keputusan dari kepala dinas kesehatan dalam penyusunan perencanaan penganggaran.

## 2. Komponen Proses

- a. Analisis situasi untuk penyusunan perencanaan penganggaran di Dinas Kesehatan dilakukan dengan menganalisis masalah yang ada pada masyarakat dan menganalisis program yang ditentukan pemerintah.
- b. Menentukan masalah kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Padang ditentukan dengan cara metode matematik yaitu berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat Kota Padang dan metode penetapan prioritas masalah kesehatan berdasarkan pencapaian program tahunan yaitu berdasarkan capaian SPM bidang kesehatan yang belum tercapai.
- c. Dalam menentukan prioritas program kesehatan belum ada persamaam persepsi antara bidang perencanaan dengan bidang dan seksi yang ada sehingga bidang dan seksi tidak mengetahui bahwa menentukan prioritas program tidak hanya ditentukan dari program pusat namun disesuaikan dengan visi-misi walikota.
- d. Penyusunan program yang ada di dinas Kesehatan Kota Padang berdasarkan usulan dari bawah yakni dari masing-masing seksi dan bidang dan menyesuaikan usulan programnya yang berdasarkan analisis situasi yang ada dimasyarakat dengan kebijakan daerah mengenai program kesehatan nasional.

- e. Penyusunan anggaran kesehatan belum diselaraskan dengan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang disusun belum sesuai dengan dasar kebutuhan

### 3. Komponen Output

- a. Terlaksananya penyusunan perencanaan penganggaran Dinas Kesehatan Kota Padang dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang. Dokumen yang dihasilkan telah sesuai dengan langkah-langkah penyusunan perencanaan penganggaran yang ada, namun waktu penetapan dokumen Rencana Dinas Kesehatan Kota Padang tidak sesuai dengan Permendagri no 54 tahun 2010.

### 1.2 Saran

Saran yang peneliti berikan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu diharapkan Dinas Kesehatan meningkatkan kualitas tenaga yang ada dengan cara memberikan pelatihan mengenai perencanaan penganggaran kesehatan terpadu (P2KT) kepada tenaga yang ada di masing-masing bidang dan seksi di Dinas Kesehatan Kota Padang dan tenaga di Puskesmas. Diharapkan Dinas Kesehatan meningkatkan pengetahuan tenaga perencana yang ada mengenai manajemen perencanaan sehingga waktu yang dialokasikan untuk penyusunan perencanaan penganggaran di Dinas Kesehatan Kota Padang dapat dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin.

Diharapkan tenaga yang ada di Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berbasis pengetahuan mampu melakukan pekerjaan secara tim serta mampu meningkatkan koordinasi antar Lintas Struktural dan Lintas Sektor

sehingga mampu menyamakan persepsi dalam penyusunan perencanaan penganggaran di Dinas Kesehatan Kota Padang. Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Padang mampu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota untuk memobilisasi dana, sehingga pemerintah kota Padang bisa menyediakan dana khusus untuk kegiatan penyusunan perencanaan penganggaran dan dapat mewujudkan anggaran kesehatan di Dinas Kesehatan menjadi 10% dari APBD Kota Padang.

Bagi Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat mendukung kecukupan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun oleh tim perencana Dinas Kesehatan Kota Padang dan dapat memberikan bimbingan khusus dalam penyusunan perencanaan penganggaran kesehatan sehingga perencanaan penganggaran yang dihasilkan semakin bagus. Serta diharapkan kepada pemerintah Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang mengikuti aturan yang ada mengenai ketentuan waktu penyusunan perencanaan penganggaran sehingga waktu penetapan dokumen perencanaan penganggaran sesuai dengan peraturan tersebut.

